



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ARICH JUWADIANTO**
2. Jabatan : **PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **710653**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 420.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/126 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.500.000
2. Tanah Seluas 2140 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 205.000.000
3. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 105.200.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.300.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.580.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.957.334

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 532.237.334

**III. HUTANG** Rp. 193.080.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 339.157.334

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.